

Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Mohammad Heri

232020100019

Dosen Pembimbing: Lailul Mursyidah

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



PENDAHULUAN

Ketahanan Pangan



Ketahanan Pangan

Isu strategis dalam upaya membangun sebuah Negara. ketahanan pangan merujuk pada kondisi dimana kebutuhan pangan dari tingkat negara hingga individu terpenuhi sepenuhnya. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan karena menjadi pemasok utama makanan, terutama bagi negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan.

Ketersediaan Pangan

Kabupaten Sidoarjo memiliki lahan pertanian yang luas untuk produksi beras, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Produksi pangan lokal di Sidoarjo saat ini mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menjaga ketersediaan sarana produksi, irigasi, dan fasilitas pertanian lainnya guna mendukung produksi pangan yang berkelanjutan. Cadangan pangan darurat seperti beras, kedelai, dan bahan pokok lainnya disiapkan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan akibat gagal panen.

PENDAHULUAN

Program Ketahanan Pangan di Desa Kendalpecabean .

Dimulai sejak tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19 yang telah melanda Indonesia. Dampak dari pandemi tersebut dirasakan oleh masyarakat desa kendalpecabean, dengan banyak pekerja yang terpaksa di-PHK

Pemerintah pusat merespon dengan mencanangkan Program Ketahanan Pangan sebagai langkah pemulihan ekonomi di tingkat desa, termasuk di Desa Kendalpecabean. Pemerintah Desa Kendalpecabean secara konsisten mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk memperbaiki infrastruktur pertanian.

Manfaat dari program ketahanan pangan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh warga Desa Kendalpecabean. Produksi pangan yang seharusnya diproduksi melalui upaya inisiatif dan inovasi para petani masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara optimal, menunjukkan bahwa program ini perlu diperkuat untuk mendorong kemandirian pangan di desa tersebut.

GAP MASALAH

Program Ketahanan Pangan

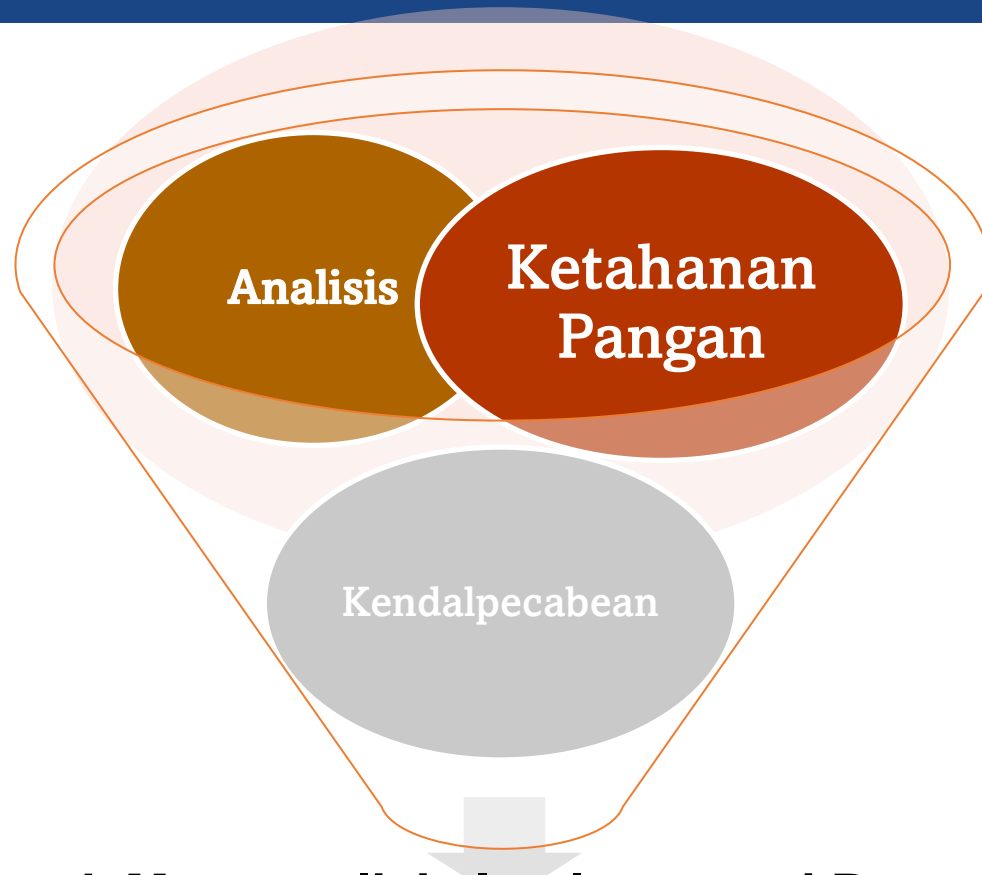


Pada sektor pertanian terdapat permasalahan dimana para petani mengalami gagal panen pada tahun 2022 akibat curah hujan tinggi dan kondisi geografis desa kendalpecabean yang bedekatan dengan laut, ketinggian daratan desa Kendalpecabean kurang lebih 3,5 m dari permukaan laut.

Sarana prasarana dilahan pertanian kurang baik yang menyebabkan perendaman sawah oleh air.

Permasalahan yang muncul akibat banjir menyebabkan gagal panen awalnya masyarakat berharap satu tahun bisa panen dua kali sedangkan desa Kendalpecabean hanya satu kali berbeda dengan desa tetangga.

Tujuan dari Penelitian dan Rumusan Masalah



Untuk Menganalisis Implementasi Program Ketahanan Pangan Yang Telah Dilaksanakan Di Desa Kendalpecabean.

Bagaimana Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?



DATA EMPIRIS

Tabel 1

Dukungan Anggaran terkait ketahanan pangan di Pemerintah Desa Kendalpecabean Candi

No.	Nama Program	Penerima Manfaat	Tahun 2023	Tahun 2024	
01	Pembangunan saluran irigasi dan Pembuatan pintu air	Petani	Rp. 209.000.000,-	Rp. 242.000.000,-	
02	Pembuatan rumah pompa	Petani	Rp. 25.000.000,-	-	
03	Pengumpanan hama tikus	Petani	Rp. 20.000.000,-	-	
04	Normalisasi saluran air irigasi	Petani	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa anggaran ketahanan pangan di tahun 2023 dan 2024 terserap untuk pembangunan saluran irigasi atau plengsengan, tujuannya untuk menahan air yang masuk ke area pertanian yang berlebihan karena area pertanian di desa Kendalpecabean cukup rendah, kurang lebih 3,5 meter dari permukaan laut. Pembangunan saluran irigasi ini menelan biaya yang sangat besar karena volume pembangunannya cukup besar. Pembuatan Pintu air dilakukan bertujuan untuk mengontrol keluar masuknya air yang masuk ke area pertanian. Pembangunan rumah pompa sebagai tempat pompa air yang digunakan untuk menguras air yang berlebihan yang menggenangi lahan pertanian. Pengumpanan hama tikus dilakukan agar populasi tikus dapat di kurangi sehingga kerusakan padi atau tanaman selain padi akibat serangan hama tikus dapat diatasi. Normalisasi saluran irigasi dilakukan untuk membersihkan sampah atau tumbuhan yang menghambat jalanya air yang masuk ke area pertanian. Pada tahun 2024 pengumpanan tikus tidak dianggarkan akan tetapi tetap dilakukan dengan swadaya masyarakat petani. Hubungan program tersebut dengan ketahanan pangan adalah untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian.

PENELITIAN TERDAHULU

2022

Hendra Duwie Putra dan rekan-rekannya (2022), Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Palembang..

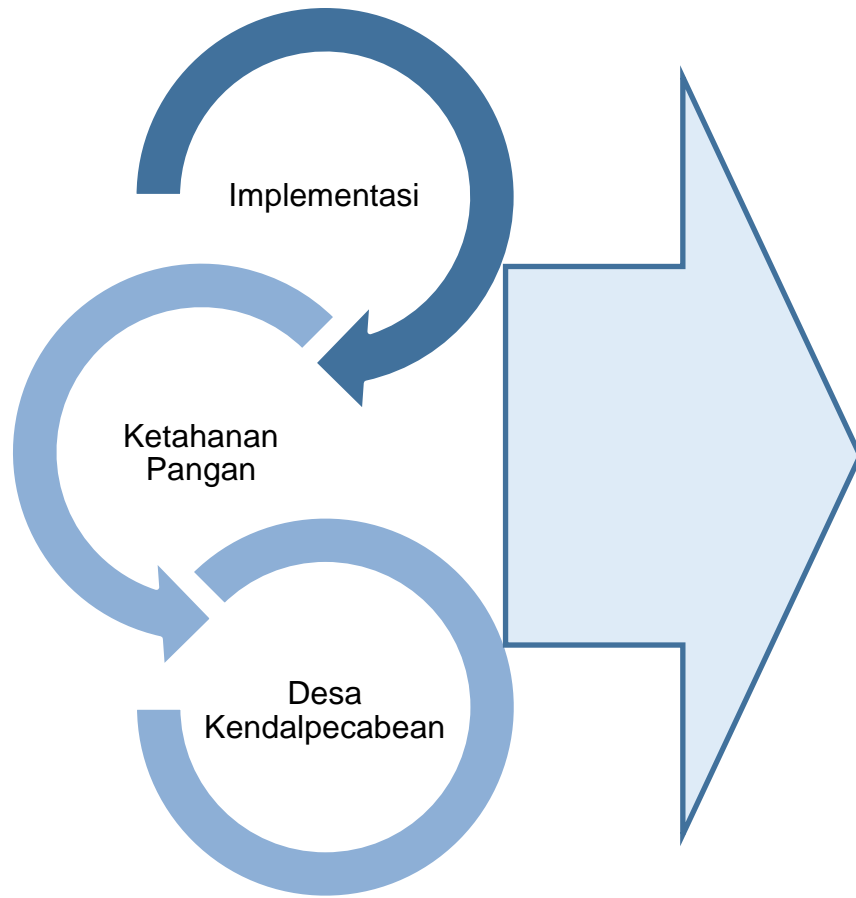
2022

Firma Yudha dan Andi Sep Kurniawan (2022), Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karangmangu dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

2023

Rosanti Padagang (2023), Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembukaan Lahan Ketahanan Pangan di Desa Beka sebagai Desa Percontohan.

TEORI PERAN YANG DIGUNAKAN



Teori Edward III yang terdiri dari 4 faktor pendukung dalam keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan program ketahanan pangan. (1) Komunikasi, yaitu informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan. (2) Sumber Daya, Mengenai sumber daya, faktor ini memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Edward III menyatakan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. (3) Disposisi, Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud. (4) Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian yang akan di uji adalah Implementasi Ketahanan Pangan di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Teknik *purposive sampling* yang melibatkan kepala desa, pelaksana kegiatan ketahanan pangan (Kasi Kesra), Kaur Keuangan, dan Ketua Kelompok Tani (POKTAN) yang dianggap mempunyai keterkaitan dalam program ketahanan pangan di Desa.

Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data adalah penyusunan, integrasi, dan informasi turunan. Penyajian data disini dimaksudkan untuk membantu peneliti melakukan analisis data secara detail. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Implementasi program ketahanan pangan sepenuhnya belum dirasakan oleh seluruh warga Desa Kendalpecabean. Produksi pangan yang seharusnya diproduksi melalui upaya inisiatif dan inovasi para petani masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara optimal, menunjukkan bahwa program ini perlu diperkuat untuk mendorong kemandirian pangan di desa tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelenggarakan pelatihan yang difokuskan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pelatihan tersebut harus dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan dan teknik pertanian yang lebih baik. Hal ini juga termasuk cara mengelola hasil pertanian agar dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh komunitas. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, diharapkan pengelolaan sumber daya pangan akan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Peran BPBD Sebagai Stabilisator

Komunikasi

Komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh kejelasan terhadap penyampaian informasi antara pelaksana terhadap sasaran, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup untuk dimiliki seorang pemberi komunikasi. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan yang telah dibuat dapat disosialisasikan secara keseluruhan dan bisa diterima dengan baik, sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran (Poktan) atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.



Sumber : Diolah dari Poktan Desa Kendalpecabean 2024

Dari hasil dokumentasi serta wawancara, Implementasi komunikasi sudah dilakukan dengan baik antar warga dengan pemerintah setempat, hal ini menunjukkan kepedulian dan juga kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah yang ada, karena Komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah desa merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa teori komunikasi implementasi kebijakan Edward III di Desa Kendalpecabean sudah sesuai dan berjalan dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan.

Sumber Daya

Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kesadaran implementor, kebijakan kurang dapat perhatian dan bisa diam ditempat serta berjalan lambat dan seadanya. Sumber daya finansial menjamin keberlangsungannya program/kebijakan.

Melihat dari gambar disamping atau dokumentasi sawah petani yang tergenang banjir kemungkinan besar sudah gagal panen, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa setempat. Bagaimana tindakan dan juga solusi terbaik agar tidak terjadi hal serupa, dari tahun ketahun tidak ada perubahan dan banjir semakin tinggi, padahal bila dilihat di desa sebelah hasil panen masih tinggi dan memang tidak terjadi banjir pada sawah petani. Hal yang sama diharapkan oleh petani Dsa Kendalpecabean agar hasil penen semakin meningkat tanpa ada kendala banjir.



Dari hasil pernyataan wawancara serta dokumentasi implementasi kebijakan Edward III pada indikator Sumber Daya sudah sesuai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kendalpecabean, hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa secepatnya akan memperbaiki infrastruktur desa yang berdampak untuk semua, dan infrastruktur perbaikan sungai akan membawa dampak sangat besar bagi para petani. Karena kesejahteraan petani di desa melibatkan lebih dari sekadar pendapatan finansial mereka. Ini juga berkaitan dengan akses mereka terhadap lahan pertanian, teknologi pertanian yang canggih, pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum. Semua hal ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup petani dan keberlangsungan pertanian mereka.

Disposisi

Disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa tahan terhadap hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Sikap atau respon dari implementor dilihat dari seberapa besar komitmen yang dibangun dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Komitmen dan kompetensi merupakan dua syarat yang harus dimiliki oleh personel yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi

Dari hasil pernyataan dan juga dokumentasi beserta wawancara terkait indikator disposisi dari teori implementasi kebijakan Edward III Pemdes Kendal pecabean dalam penanganan Poktan sudah sesuai dan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara pemdes bahwasannya ada komitmen untuk mengatasi permasalahan ayang ada dan disambut para petani ada kemauan sehingga kerjasama antara pemangku kebijakan dan juga para petani mampu memberikan perubahan secara signifikan untuk keberhasilan para petani, sebagaimana Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini menilai terhadap mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Mengenai Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi faktor penghambat. Hal ini dilihat dari belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tabel 2 Pengurus Poktan beserta Tupoksinya Desa Kendalpecabean (2025)
Sebelum tabel berikan kalifaat pengantar, dan di bawah tabel beri penjelasan terkait tabel tersebut

Pengurus Poktan Sidorukun I SK Poktan NO.16 Tahun 2001			
No	Nama Pengurus	Jabatan	Tupoksi
1	Sutrisno	Ketua	Pengambilan keputusan, koordinasi, dan perwakilan kelompok tani serta Bertugas memimpin organisasi petani dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan organisasi.
2	Usman Afandi	Sekretaris	Administrasi, pencatatan kelompok tani.
3	Abdul Kodir	Bendahara	Pencatatan dan pengelolaan keuangan
4		Koordinator Poktan	Promosi produksi pertanian, pemasaran, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
Pengurus Poktan Sidorukun II SK Poktan NO.15 Tahun 2001			
No	Nama Pengurus	Jabatan	Tupoksi
1	Mistar	Ketua	Pengambilan keputusan, koordinasi, dan perwakilan kelompok tani serta Bertugas memimpin organisasi petani dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan organisasi.
2	Sulton	Sekretaris	Administrasi, pencatatan kelompok tani.
3	Sri Warni	Bendahara	Pencatatan dan pengelolaan keuangan
4	Sutrisno	Koordinator Poktan	Promosi produksi pertanian, pemasaran, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Struktur Birokrasi

Melihat dari pernyataan hasil wawancara dan juga Pengurus Poktan beserta Tupoksinya Desa Kendalpecabean, Implementasi struktur birokrasi dengan teori implementasi kebijakan Edwar III Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Selain posisi posisi di atas Pengurus Organisasi Poktan Desa kendapecabean, struktur kepengurusan dalam kelembagaan petani juga sudah terdapat beberapa seksi atau bidang, seperti: Seksi Produksi: Bertugas menangani kegiatan produksi, seperti pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Seksi Pemasaran: Bertugas menangani kegiatan pemasaran hasil pertanian. Seksi Keanggotaan: Bertugas mengelola keanggotaan organisasi dan menjaga hubungan baik dengan anggota.

Hal ini dapat membantu petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani dengan lebih efisien dan efektif. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan kelembagaan ekonomi petani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam penetapan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan yang baik. Dengan demikian, pengelolaan kelembagaan ekonomi petani menjadi lebih transparan dan akuntabel. Mempermudah pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha tani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam identifikasi pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan tertentu. Hal ini dapat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Mencegah terjadinya konflik antar anggota kelembagaan ekonomi petani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam menetapkan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Hal ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik antar anggota.

KESIMPULAN

Implementasi program ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini sudah dilaksanakan semenjak Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo disahkan. Namun hingga saat ini ketiga strategi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum mampu berjalan dengan baik. Hal ini mengingat karena belum terbentuknya regulasi yang mengatur LP2B secara khusus. Dari hasil Implementasi kebijakan menurut teori Edwar III Sebagai berikut: Pertama, Implementasi komunikasi sudah dilakukan dengan baik antar warga dengan pemerintah setempat, hal ini menunjukkan kepedulian dan juga kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah yang ada, karena Komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pertama, Implementasi komunikasi sudah dilakukan dengan baik hal ini menunjukkan kepedulian dan juga kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah yang ada, karena Komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua Sumber Daya terlihat dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa secepatnya akan memperbaiki infrastruktur desa yang mampu berdampak untuk semua dari dana desa, dan infrastruktur perbaikan sungai akan membawa dampak sangat besar bagi para petani.

Ketiga disposisi dalam penanganan Poktan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari para petani ada kemauan sehingga kerjasama antara pemangku kebijakan dan juga para petani mampu memberikan perubahan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud.

Keempat Struktur Birokrasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Faktor ini sangat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Mencegah terjadinya konflik antar anggota kelembagaan ekonomi petani.

REFRENSI

- [1] Prasetyani, D., & Mahendrastiti, A. E. (2022). Pelatihan tanaman hidroponik sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan di Kecamatan Boyolali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(10). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- [2] Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan*. Indonesia, 2022.
- [3] Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1)
- [4] Y. Sihombing, "Inovasi Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan," *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, vol. 5, pp. 83–90, Aug. 2023, doi: 10.30595/pspfs.v5i.707.
- [5] Badan Pangan Nasional. (2020). *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) 2020-2024*. https://badanpangan.go.id/storage/app/media/KSKPG%202020-2024%20_feb%202020.pdf
- [6] R. Prabowo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia Rossi Prabowo Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang," *Mediagro*, vol. 6, no. 2, 2010.
- [7] A. Darmansah, . Sulistiono, T. Nugroho, and E. Supriyono, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Budi Daya Ikan Lele di Desa Balongan, Indramayu, Jawa Barat," *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2016, doi: 10.29244/agrokreatif.2.1.8-16.
- [8] I Nyoman Sukraaliawan, "UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG," *Locus, Majalah Ilmiah FIA*, 2020.
- [9] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- [10] Administrator. (2016, 26 Agustus). *Wilayah Desa*. Kendalpecabean. Diakses pada 7 Januari 2025, dari <https://kendalpecabean.com/Wilayah%20Desa>
- [11] H. Duwie Putra, A. Lionardo, and A. Agus, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA PALEMBANG (STUDI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALEMBANG)," *Tanah Pilih*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.30631/tpj.v2i2.1233.
- [12] F. Yudha and A. S. Kurniawan, "Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karangmangu dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *At Tamkin*, vol. 2, no. 1, 2022.
- [13] Rosanti Padagang, Ika Rafika, and Mohammad Ega Nugraha, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembukaan Lahan Ketahanan Pangan Di Desa Beka Sebagai Desa Percontohan," *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, vol. 3, no. 2, 2023, doi: 10.55606/optimal.v3i2.1388.
- [14] G. C. Edward III, *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press., 1980.
- [15] M. B. Miles and A. M. Huberman, "An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis Second Edition," 2014.

